

## TAK TERPENGARUH COVID-19 Jaksa Mitra Desa Jalan Terus

**BANTUL (KR)** - Program Jaksa Mitra Desa (JMD) di Kejari Bantul hingga saat ini jalan terus, tak terpengaruh pandemi Covid-19. JMD sejak semula bertujuan mendampingi Desa dalam pengelolaan dana desa, agar penyusunan pelaksanaan anggaran dana desa tidak mengalami kekeliruan yang bisa berdampak terhadap kelancaran tugas lurah atau perangkat desa.

Kajari Bantul, Nur Asiah SH MHum, Jumat (16/10), mengemukakan dalam masa pandemi Covid-19 jika ada penggunaan anggaran di desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan penanganan Covid-19, harus ada catatan yang rinci dan bisa dipertanggungjawabkan. "Ya dimana saja penggunaan dana harus ada catatan rinci dan merupakan tertib administrasi," ungkapnya.

Program JMD yang berjalan hingga saat ini bertujuan untuk mengawal pelaksanaan dana desa agar penggunaannya dilaksanakan secara benar. "Untuk itu, Tim JMD datang ke desa ikut bergabung

melakukan diskusi dan sarasehan bersama pihak desa terkait dana desa. Tujuannya agar pembangunan dari alokasi dana desa bisa sejalan, selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah maupun desa," tuturnya.

Dengan keikutsertaan jaksa berdiskusi di desa, diharapkan akan menghilangkan kesan angker terhadap jaksa. "Jaksa jangan menakuti masyarakat, tapi harus bisa bersahabat dan berdekatan dengan masyarakat dan jadi tempat bertanya tentang masalah hukum," imbuh Kajari Bantul. Karena itu, jika ada perangkat desa yang mempunyai permasalahan hukum yang harus diselesaikan dan perlu pendampingan serta konsultasi jangan takut untuk datang ke Kejari Bantul. Konsultasi hukum di Kejari gratis.

Sementara kegiatan persidangan selama pandemi Covid-19, yang melibatkan jaksa dilakukan secara online atau daring. Sehingga di Kejari Bantul menyediakan ruang dan sarana sidang secara daring. (Jdm)-f

## Pendaftaran Pengawas TPS Diperpanjang

**BANTUL (KR)** - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul membuka perpanjangan pendaftaran bagi Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun masa perpanjangan pendaftaran selama 4 hari sejak 16 hingga 19 Oktober mendatang.

Anggota Bawaslu Bantul, Nuril Hanafi, menuturkan perpanjangan masa pendaftaran tersebut dilakukan karena hingga hari terakhir pendaftaran pada Kamis (15/10) baru terdapat pendaftar sebanyak 1.682 orang, padahal jumlah TPS sebanyak 2.085. "Target Bawaslu untuk jumlah pendaftar Pengawas TPS sebanyak 4.170 atau dua kali lipat kebutuhan di TPS," jelasnya. Nuril menyebutkan, pendaftaran Calon Pengawas TPS dilaksanakan di semua Kantor Pan-

waslu Kecamatan meliputi penerimaan berkas, seleksi administrasi dan tes wawancara.

Proses pendaftaran dan seleksi Calon Pengawas TPS dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan yang dapat dibantu oleh Panwaslu Desa karena memang sesuai pedoman dari Bawaslu RI bahwa pembentukan pengawas TPS menjadi kewenangan Panwaslu Kecamatan.

Informasi pendaftaran pengawas TPS selengkap-

nya dapat mengunjungi Website Bawaslu Kabupaten Bantul [www.bantul.bawaslu.go.id](http://www.bantul.bawaslu.go.id) atau datang langsung ke kantor Panwaslu Kecamatan yang berada di kantor kecamatan setempat.

"Kami berharap peran serta masyarakat turut mengawal dan mengawasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul supaya berjalan secara demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat," jelasnya. (Aje)-f

## Tindak Tegas ASN Tidak Netral

**BANTUL (KR)** - Pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Bantul, telah terjadi beberapa permasalahan tapi bisa diselesaikan melalui solusi dalam acara *Coffe Morning*. Terkait adanya indikasi ketidaknetralan ASN maupun perangkat desa, hendaknya pihak Bawaslu segera melaporkan dan menindaklanjuti untuk diputuskan dalam musyawarah Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Hal tersebut ditekankan Pjs Bupati Bantul Budi Wibowo SH MH pada acara *Coffe Morning* ke-3 di halaman Makodim 0729 Bantul, Jumat (16/10). "Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga penindakan. Jika ada ASN maupun perangkat desa memang terbukti melakukan ketidaknetralan dalam tahapan Pilkada, tindak saja dengan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Untuk ini perlu melibatkan Inspektorat," ungkap Budi Wibowo.

Menurutnya, selama tahapan Pilkada di masing-masing sektor, seperti petugas Babinsa, Babinkamtibas dan jajaran lainnya yang terkait dengan pengamanan Pilkada sudah sepatutnya menjaga netralitas, termasuk ASN maupun perangkat desa.

"Tentang penertiban alat peraga kampanye sudah ada solusinya dan di-



Seluruh anggota Forkompinda hadir dalam Coffe Morning di Makodim 0729 Bantul.

ambil tindakan. Kemudian kami akan menggerakkan semua OPD yang harus bertanggungjawab terhadap personelnya masing-masing. Kalau ada yang tidak netral ya ditindak saja dan dilanjutkan proses. Sanksi apa saja, kami tidak mentolelir. Terbukti tidak netral ya ditindak saja," tegasnya.

Sementara wakil dari Bawaslu Bantul, Supardi, menegaskan pihaknya bertugas mengawasi jalannya Pilkada juga menjaga netralitas. Tidak akan memihak kepada salah satu paslon. "Ada informasi pelanggaran dari pihak paslon manapun kami akan melakukan tindakan," jelasnya.

Supardi menekankan, Bawaslu setu-

ju kalau ada pelanggaran harus ditindak tegas. Aturan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada harus dijalkan. Sedangkan penertiban APK, seperti pemasangan baliho dari kedua Paslon sebagian Rabu (14/10) lalu sudah dibersihkan karena menyalahi aturan.

Tentang ketidaknetralan, selain ada indikasi dari ASN dan perangkat desa Bawaslu juga mengindikasikan ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak netral. Hadir dalam *Coffe Morning* lengkap jajaran Forkompinda, Sekda, Inspektorat, KPU, Bawaslu, BPN, Satpol PP dan OPD lainnya. (Jdm)-f

## SELAMA KAMPANYE PILKADA Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan

**BANTUL (KR)** - Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menemukan beberapa pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh peserta Pilkada di Bantul. KISP mencatat ada 10 pelanggaran kampanye yang dilakukan kedua paslon peserta Pilkada.

Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi SIP MIP, Kamis (15/10), menuturkan dalam rentang waktu 2 minggu ini yakni 23 September 2020 hingga 6 Oktober, atau dimulai sejak terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam kondisi bencana nonalam.

Dalam temuan 2 minggu terakhir didapatkan masih banyak kampanye terbatas yang dilakukan oleh paslon melanggar protokol kesehatan. Temuan ini didasarkan pada pengamatan yang dilakukan baik secara tatap muka dan di media sosial.

"Dalam temuan pematuan yang dilakukan oleh Komite Independen Sadar Pemilu di Kabupaten Bantul tercatat ada 10 bukti temuan terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye yang dilakukan kedua pasangan calon. Bukti-bukti yang kami temukan kami sampaikan ke Bawaslu Bantul," ujarnya.

Atas hasil temuan ini KISP mendorong Bawaslu Kabupaten Bantul untuk membentuk tim Buzzer atau akun yang tidak diked-

etahui untuk masuk ke dalam grup-grup tim sukses kandidat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan di lapangan secara langsung.

"Kami juga mendorong Bawaslu Kabupaten Bantul untuk membentuk tim relawan 60 yang dibina oleh Bawaslu Kabupaten Bantul untuk mengawasi dari sisi media sosial dan mendorong Bawaslu Kabupaten Bantul untuk serius dalam pengawasan dalam ranah media sosial," jelasnya.

KISP juga mendorong Bawaslu untuk mengambil sikap tegas dalam memberikan sanksi kepada para kandidat yang melanggar protokol kesehatan. dan benar-benar menerapkan aturan yang sudah di tetapkan. (Aje)-f



Pembukaan FGD oleh Sekda Bantul, Drs Helmi Jamharis MM didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Bantul Nugroho Eko Setyanto SSos dan dari Baramus DIY Ki Bambang Widodo.



Suasana FGD hari pertama.

### DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL GELAR FGD PERMUSEUMAN

# Museum Potensi Besar di Bantul

**BANTUL (KR)** - Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul menggelar rangkaian FGD (Forum Group Discussion) untuk pengembangan museum di wilayah Bantul. Keberadaan 16 museum di Kabupaten Bantul, atau terbanyak di wilayah DIY menjadi potensi kekayaan peninggalan sejarah, seni, budaya, dan pariwisata yang bisa dikembangkan. "Hingga saat ini pemerintah dan pengelola museum masih berjuang mengangkat citra museum, di antaranya melalui Gerakan Nasional Cinta Museum 'museum di hatiku', Hari Museum Indonesia," tutur Sekda Kabupaten Bantul Drs Helmi Jamharis MM saat membuka FGD Museum Kabupaten Bantul, Jumat (16/10) di Hotel Ros In, Ringroad Selatan, Bantul.

Helmi menyebutkan menurut PP 66/2015 museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikan dengan masyarakat. "Museum bisa milik pemerintah, pemda, maupun orang/masyarakat bisa dikembangkan dengan peran serta masyarakat, manajemen pengelolaan yang baik," tutur Helmi

Sedang pemerintah, Kepala Daerah lanjut Helmi dapat memberikan kompensasi kepada orang yang mempunyai museum atau orang yang memberi sumbangan. Kompensasi dapat berupa pendampingan, tenaga teknis, tenaga ahli, sarpras, dan tanda penghargaan.

Sedangkan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Nugroho Eko Setyanto SSos MM dalam laporannya menyebutkan FGD yang dilaksanakan 3 hari dengan SOP Covid-19 diikuti pihak-pihak berkompeten. "Tujuannya, FGD hari pertama memberikan pembinaan dalam pengelolaan manajemen dan SDM Museum yang ada di Kabupaten Bantul, Jumat (16/10) kemudian Pembinaan dan Pengembangan Publikasi IT Permuseuman Sabtu (17/10), Persiapan Legalitas pendirian Museum di Kabupaten Bantul, Senin (19/10)

FGD Jumat (16/10) hari pertama diikuti pengelola, kurator dan edukator 16 museum yang ada di Bantul yaitu Museum Jenderal Besar HM Soeharto (Sedayu), Museum Taman Tino Sidin (Kasihah), Museum Universitas PGRI/UPY (Kasihah), Museum Cokelat Monggo (Kasihah), Museum Wayang Kekayon (Banguntapan), Museum Karahayon (Banguntapan), Monumen Ngoto (Banguntapan), Museum Tembi (Sewon), Museum Rumah Garuda (Sewon), Museum HOJ (Sewon), Museum Pleret, Museum Tani Jawa (Imogiri), Museum Bantul Masa Belanda (Bantul), Museum Wayang Beber Sekartaji (Bambanglipuro), Museum Gumuk Pasir (Kretek), Museum Budaya Pesisir Selatan (Sanden).

Selanjutnya peserta FGD hari kedua perwakilan

OPD, MGMP Sejarah, AGSI, HPI, MSI, Komunitas dan pemerhati museum/sejarah. Sedang peserta hari ketiga dari Barahmus (Badan Musyawarah Musea) DIY, Forum Komunikasi Museum Bantul (FKMB), OPD, Kecamatan DKB dan Komunitas. "Total semuanya sebanyak 120 peserta," ujarnya.

FGD Jumat (16/10) hari pertama dengan moderator Suwandi SS. Narasumber dari Barahmus DIY Ki Bambang Widodo dan Dr Hadjar Pamadhi MA Hons (Barahmus DIY).

"FGD ini sangat bagus, dapat berkembang karena ada sinergisitas antara Barahmus DIY - Forum Komunikasi Museum Bantul (FKMB) dan Dinas Kebudayaan Bantul: ada Tim Kajian Peningkatan Kualitas untuk Museum Jenderal Besar HM Soeharto dan Museum Tino Sidin (2020), berlanjut akan tambah museum baru Museum Seniman Giri Saptadi di Imogiri," ucap Ki Bambang

Ki Bambang berharap implementasi hasil FGD: agar calon-calon museum bisa memenuhi PP No 66/2015, menaikkan hasil standarisasi dr C ke B. "Kaderisasi pengelola museum, usaha menambah koleksi, virtualisasi koleksi museum agar generasi milenial mengenal dan cinta museum," ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Sejarah Bahasa Sastra

dan Permuseuman Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Drs Dahroni MM menyebutkan hasil FGD nantinya akan direkomendasikan untuk pengembangan museum di Bantul.

"Selanjutnya ada acara wajib kunjung museum yang dulunya diikuti siswa kini Bapak/Ibu Guru dan komunitas-komunitas di Kabupaten Bantul akan dilaksanakan 20, 21, 24, dan 26 Oktober dengan 12 museum yang dikunjungi," jelasnya

Dari 16 museum di Bantul, empat museum di antaranya tidak dikunjungi yaitu Rumah Garuda, Museum Bantul Masa Belanda, Museum HOJ, dan Museum Budaya Pesisir. "Peserta kunjungan ke-12 museum dari MGMP Sejarah guru SMP, Guru IPS Sejarah SD, Komunitas, Himpunan Pramuwisata, OPD, KNPI, Dimas Dijeng Bantul dan lainnya. "Dilanjutkan lomba foto museum pada pertengahan November 2020," ujarnya.

Lebih lanjut FGD Sabtu (17/10) hari moderator Fajar Wijanarko SS, dengan narasumber Ketua FKMB Bantul Gatot Nugroho SPT, dan Direktur PT Integra Inovasi Indonesia Yuda Wicaksana Putra ST MBA. Ditutupi Senin (19/10) narasumber FGD hari ketiga Kepala Disbud DIY Drs Budiharjo MM (Barahmus DIY) dan Greg Wuryanto (Dosen). (R-4)-d



Penyerahan buku museum dari Baramus kepada Sekda Bantul Drs Helmi Jamharis MM.



Kunjungan ke museum digalakkan Dinas Kebudayaan Bantul di Museum HM Soeharto.



Penyerahan juara LCC museum di Dinas Kebudayaan Bantul.